

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Pembangunan yang diharapkan pastinya adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap masalah-masalah perekonomian, seperti mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan kemiskinan, dan berkeadilan sosial. Salah satu penyebab peningkatan Pembangunan ekonomi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jika dilihat, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi, akan tetapi hal ini dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satu masalahnya adalah masalah dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu pengangguran.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peranan ketenagakerjaan sangat diperlukan. Masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran merupakan masalah ekonomi yang dihadapi hampir semua negara didunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju (Muriatil,2016).

Keberhasilan Pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya angka pengangguran di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan Tingkat pengangguran adalah salah satu indikator yang bisa dilihat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu daerah yang merupakan akibat dari pembangunan ekonomi.



Salah satu faktor penyebab pengangguran adalah jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang juga diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja akan meningkatkan jumlah tingkat pengangguran apabila peningkatan tersebut tidak diimbangi peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja.

Jumlah penduduk merupakan total penduduk yang bertempat tinggal pada suatu wilayah dalam kurung waktu tertentu. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka jumlah Angkatan kerja dan tenaga kerja pun ikut mengalami peningkatan.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki potensi yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui multiplier effect karena adanya agregat demand yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan mengakibatkan terjadinya masalah ketenagakerjaan seperti semakin tinggi angka pengangguran yang dapat meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas dan fenomena sosial ekonomi di masyarakat (Wahyuni, 2005).

Masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh negara berkembang seperti Negara Indonesia. Menurut Alghofari, 2010 menyatakan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan



an lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Hal tersebut dikarenakan Tingkat Pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya pengangguran di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan Tingkat

pengangguran adalah salah satu indikator yang bisa dilihat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu daerah yang merupakan akibat dari pembangunan ekonomi.

Selain karena keterbatasan dan kurangnya lapangan pekerjaan, faktor lain yang diduga mampu mempengaruhi kondisi pengangguran adalah upah minimum. Upah adalah pembalasan berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah mempengaruhi jumlah tenaga kerja di suatu negara. Ketika upah minimum suatu wilayah tinggi, tenaga kerja pun lebih tertarik mencari untuk memperoleh pekerjaan karena penawaran upah yang tinggi. Hal tersebut dinilai dapat menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan karena kemauan masyarakat yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari – hari.

Upah minimum merupakan kebijakan penting dalam pasar tenaga kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang adil dan layak. Di Indonesia, kebijakan upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan variasi yang signifikan antara daerah. Upah minimum yang tinggi dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan meningkatkan daya beli mereka dan mendorong konsumsi. Namun, ada kekhawatiran bahwa upah minimum yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya operasional bagi pengusaha, terutama di sektor informal dan usaha kecil. Hal ini bisa menyebabkan pengurangan jumlah pekerjaan yang tersedia, atau bahkan pemutusan hubungan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat



guran.

Jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat pengangguran. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi

yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama dibidang ketenagakerjaan. Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk, terutama dalam kelompok usia produktif, mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Pertumbuhan populasi yang pesat, khususnya di daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, dapat memperbesar jumlah pencari kerja. Jika pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka dapat terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Selain itu, ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja juga dapat menyebabkan pengangguran struktural, di mana sejumlah pekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.

Dalam mengevaluasi perkembangan pembangunan disuatu wilayah, salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dijelaskan oleh seorang ekonom yang bernama Arthur Okun yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negative antara tingkat pengangguran dengan Gross Domestic Product (GDP) dimana pada setiap penambahan sebesar tiga persen pada GDP riil, maka akan mengurangi tingkat pengangguran sebesar satu persen (Freeman, 2001).



pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama kesehatan ekonomi suatu  
 Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan biasanya  
 an dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi

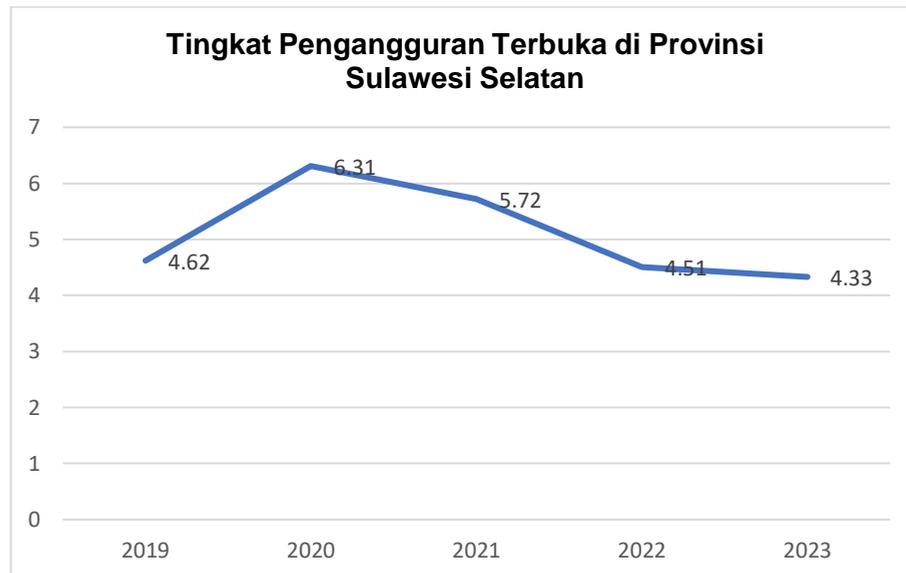
pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata atau tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan pembangunan dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja. Di beberapa daerah, pertumbuhan ekonomi yang pesat mungkin tidak tercermin dalam penurunan pengangguran jika sektor-sektor ekonomi tertentu berkembang sementara sektor lain tetap stagnan atau menurun.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup, yang pada gilirannya dapat menurunkan konsumsi dan investasi. Bagi dunia usaha, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi sehingga perusahaan mungkin terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sebaliknya, inflasi yang stabil dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan ekonomi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.

Salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Besarnya nilai TPT memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2016), pengangguran terbuka yaitu terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data yang

dari Badan Pusat Statistik, besarnya tingkat pengangguran di Provinsi Selatan dalam 5 tahun terakhir terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini.





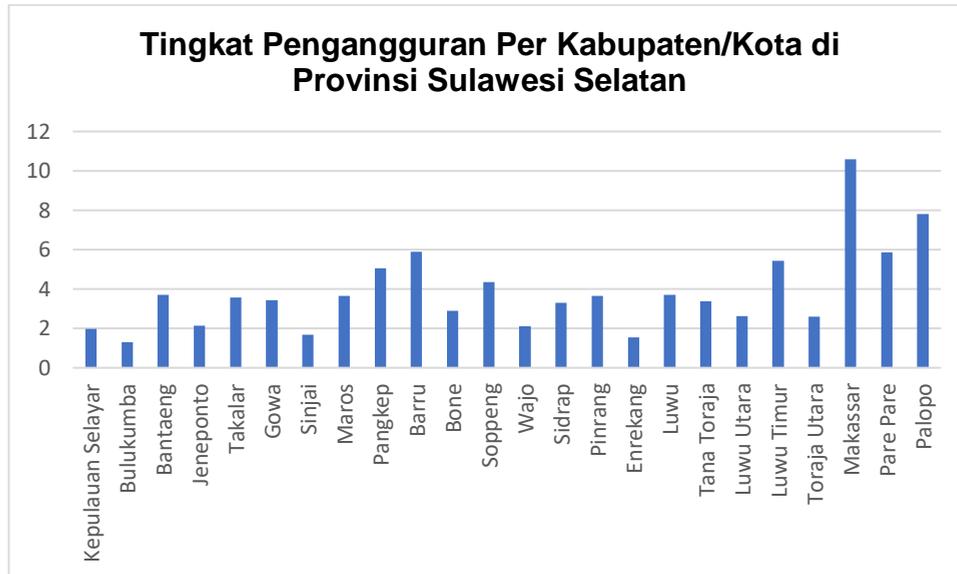
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 dalam Persen (%)**

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga berada pada angka 6,31%. Hal tersebut terjadi karena adanya PHK besar-besaran pada beberapa perusahaan yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya covid-19. Namun demikian, angka pengangguran kembali mengalami penurunan pada tahun 2021-2023 dengan angka 5,72% pada tahun 2021, 4,51% pada tahun 2022, dan 4,33% pada tahun 2023.

Secara khusus, jumlah tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 didominasi oleh Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:





Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

**Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan Tahun 2023 Dalam Persen (%)**

Pada Gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa daerah dengan persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar yang mencapai angka 10,60%. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Tingginya angka pengangguran di Kota Makassar ini salah satunya disebabkan oleh urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Namun, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah para pencari kerja. Akibatnya para pencari kerja yang tidak terserap tersebut mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Selain itu, Daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua dipegang oleh Kota Palopo dengan angka 7.81%. Kemudian disusul oleh Kota Pare-Pare dengan angka 5.86%.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat pengangguran, dengan judul

h Upah Minimum, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Inflasi

o Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sulawesi Selatan”.



## 1.2. Rumusan masalah

1. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan?

## 1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan

## 1.4. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan, yaitu:



ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

### 1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pemerintah yang nantinya akan berguna dalam memahami beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan hingga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada.

### 2. Pengembangan Ilmu

Melalui penelitian ini, diharapkan nantinya dapat berperan dalam menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam bidang ekonomi.

### 3. Peneliti

Tentunya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat pengangguran.



## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori

#### 2.1.1 Teori Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja adalah mekanisme di mana tenaga kerja (pekerja) dan pemberi kerja (perusahaan) berinteraksi untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan upah yang akan dibayar. Dalam konteks teori pasar tenaga kerja, upah memainkan peran sentral dalam menentukan keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari apa yang dikerjakan dan dinyatakan dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, peraturan perundang-undangan, atau perjanjian kerja, termasuk tunjangan pekerja dan keluarganya dari pengusaha atau pemberi kerja. Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 dalam Dernbrug (2012), upah ialah hak yang didapat oleh pekerja/buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjanya yang penetapannya dan pembayarannya didasarkan pada suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan mereka lakukan. Dengan kata lain upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang,



dimana cakupannya tidak hanya komponen gaji/upah, melainkan juga uang lembur dan tunjangan lainnya yang didapatkan secara rutin.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Upah minimum adalah upah terendah (termasuk tunjangan teratur tetapi tidak termasuk upah lembur) yang dibayarkan kepada karyawan (per jenis jabatan/pekerjaan). Dalam tingkat kabupaten/kota, upah minimum yang berlaku disebut Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum “upah minimum menjelaskan bahwa upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap”. UMK ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan harus lebih tinggi daripada UMP. Hal tersebut dapat menjadi langkah yang efektif dalam menjaga daya beli pekerja dan mencegah upah yang terus merosot di bawah standar kebutuhan dasar.

Upah Minimum menjadi salah satu indikator untuk mengatasi tingkat pengangguran. Upah Minimum yang rendah berarti penduduk di suatu wilayah tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang rendah pula, sedangkan kota atau kabupaten yang memiliki Upah Minimum Regional yang tinggi berarti penduduk di kota atau kabupaten tersebut memiliki standar hidup dan tingkat konsumsi yang tinggi.

David Ricardo berpendapat bahwa upah pekerja tergantung kepada keperluan subsistensi, yaitu kebutuhan minimum yang diperlukan para pekerja agar dapat bertahan hidup dan kebutuhan minimum tergantung pada lingkungan dan adat istiadat.



alam teori klasik, pasar tenaga kerja beroperasi berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Upah diatur oleh keseimbangan antara jumlah

tenaga kerja yang tersedia dan jumlah pekerjaan yang ditawarkan. Menurut teori ini, Upah dianggap sebagai harga dari tenaga kerja. Ketika permintaan tenaga kerja (demand for labor) meningkat, upah cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja (supply of labor) meningkat, upah cenderung turun.

### 2.1.2 Teori Malthus

Teori Malthus tentang hubungan antara jumlah penduduk dan pengangguran didasarkan pada premis bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melebihi pertumbuhan sumber daya ekonomi, khususnya makanan. Menurut Malthus, penduduk tumbuh secara eksponensial (seperti 2, 4, 8, 16), sedangkan produksi sumber daya hanya tumbuh secara aritmatika (seperti 2, 4, 6, 8). Ketidakseimbangan ini menyebabkan kekurangan sumber daya, yang pada akhirnya memicu masalah ekonomi, termasuk kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Dalam situasi ini, banyak orang kehilangan akses terhadap pekerjaan yang layak karena ekonomi tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap tenaga kerja tambahan.

Dalam pandangan Malthus, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menciptakan tekanan besar terhadap pasar tenaga kerja. Ketika jumlah tenaga kerja melebihi permintaan, surplus tenaga kerja ini menyebabkan peningkatan pengangguran. Selain itu, persaingan tinggi di antara para pekerja untuk pekerjaan yang terbatas dapat menekan tingkat upah menjadi sangat rendah, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini memperburuk siklus kemiskinan dan membuat masyarakat semakin rentan

krisis ekonomi.



Malthus mengusulkan pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai solusi untuk mencegah krisis ini. Ia menyarankan mekanisme seperti *moral restraint*, yaitu penundaan pernikahan dan pengurangan angka kelahiran, agar pertumbuhan penduduk lebih seimbang dengan sumber daya ekonomi. Dengan cara ini, masalah seperti pengangguran dan kemiskinan dapat diminimalkan. Namun, teori ini sering dianggap pesimistis karena mengabaikan peran inovasi teknologi dan kebijakan ekonomi dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.

### 2.1.3 Hukum Okun

Hukum Okun adalah sebuah hubungan empiris yang menghubungkan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Ditemukan oleh ekonom Arthur Okun pada awal tahun 1960-an, hukum ini menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, hukum Okun menunjukkan bahwa untuk setiap penurunan satu persen dalam tingkat pengangguran, PDB negara akan tumbuh lebih cepat sekitar dua hingga tiga persen dari tingkat pertumbuhan potensialnya. Dengan kata lain, semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin besar penurunan pengangguran yang dapat terjadi.

Secara teori, Hukum Okun didasarkan pada ide bahwa peningkatan output atau pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat cenderung meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk atkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketika ekonomi ang, perusahaan membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi



permintaan yang meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi melambat atau terjadi resesi, permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun, yang menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja dan meningkatkan tingkat pengangguran.

#### 2.1.4 Teori Phillips

Pada tahun 1958, ekonom yang bernama A.W. Phillips menerbitkan sebuah artikel pada jurnal Inggris "Economica". Artikel tersebut berjudul "The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom 1861-1957". Dalam artikel tersebut, Phillips menunjukkan korelasi negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dengan kata lain, Phillips menunjukkan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran yang rendah cenderung memiliki tingkat inflasi yang tinggi, sedangkan tahun-tahun dengan pengangguran yang tinggi cenderung memiliki inflasi rendah (Mankiw, 2014:272)

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka

naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.



Phillips menemukan bahwa ketika tingkat pengangguran rendah, tekanan terhadap upah akan meningkat, yang kemudian menyebabkan harga barang dan jasa naik, atau inflasi. Sebaliknya, ketika pengangguran tinggi, permintaan terhadap barang dan jasa cenderung lebih rendah, yang menyebabkan inflasi juga lebih rendah. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, kurva Phillips menggambarkan adanya trade-off atau kompromi antara pengangguran dan inflasi: kebijakan yang menurunkan pengangguran dapat menyebabkan inflasi lebih tinggi, dan sebaliknya, kebijakan yang mengurangi inflasi bisa menyebabkan pengangguran meningkat.

Namun, teori ini berlaku lebih tepat dalam jangka pendek, di mana perubahan dalam permintaan agregat dapat memengaruhi tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam jangka panjang, hubungan ini tidak lagi berlaku dengan cara yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian ekspektasi inflasi. Masyarakat dan pelaku ekonomi, seperti pekerja dan pengusaha, akan memperkirakan tingkat inflasi yang akan datang dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ekspektasi tersebut. Sebagai contoh, jika inflasi mulai meningkat, pekerja akan meminta kenaikan upah untuk mengimbangi peningkatan biaya hidup, dan perusahaan akan menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, meskipun pengangguran mungkin tetap rendah dalam jangka pendek, inflasi akan terus meningkat, sehingga pengangguran kembali menuju tingkat alami atau tingkat pengangguran yang wajar dalam perekonomian.



ada tahun 1970-an, terjadi fenomena stagflasi, yaitu keadaan di mana tingkat pengangguran tinggi terjadi secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa

hubungan antara pengangguran dan inflasi yang digambarkan oleh Kurva Phillips tidak selalu berlaku, terutama dalam kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil atau ketika faktor-faktor eksternal, seperti krisis energi, mempengaruhi perekonomian. Krisis tersebut mengungkapkan kelemahan teori Phillips dalam menjelaskan dinamika ekonomi yang lebih kompleks, di mana inflasi bisa tinggi meskipun pengangguran juga tinggi. Untuk mengatasi kekurangan ini, ekonomi modern mengadaptasi teori Phillips dengan konsep ekspektasi inflasi yang lebih dinamis. Teori Phillips Baru atau New Phillips Curve mengakui bahwa dalam jangka panjang, pengangguran cenderung kembali ke tingkat alami atau tingkat pengangguran yang tidak dapat dikurangi lebih lanjut tanpa menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, meskipun dalam jangka pendek terdapat hubungan terbalik antara pengangguran dan inflasi, dalam jangka panjang ekspektasi inflasi menjadi faktor yang lebih dominan. Hal ini memberikan wawasan penting bagi kebijakan moneter dan fiskal, yang perlu mengelola keseimbangan antara inflasi dan pengangguran untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Hubungan Upah Minimum dengan TPT

Upah minimum merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang paling sering digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk melindungi kesejahteraan pekerja, terutama mereka yang berada di lapisan bawah dalam struktur ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja

ra upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serta mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.



Dalam perspektif ekonomi klasik, upah dianggap sebagai harga tenaga kerja yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Jika pemerintah menetapkan upah minimum di atas tingkat keseimbangan pasar, hal ini dapat menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja (yakni, pengangguran). Dalam pandangan ini, kenaikan upah minimum yang tidak sejalan dengan produktivitas pekerja akan meningkatkan biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Akibatnya, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi jumlah pekerja, mengurangi jam kerja, atau bahkan berhenti merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan upah minimum dapat menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia membayar upah yang lebih tinggi, mereka mungkin akan mengurangi jumlah pekerja yang dipekerjakan, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Pekerja dengan keterampilan rendah atau yang bekerja di sektor informal lebih rentan terhadap pengangguran ketika upah minimum dinaikkan. Hal ini karena perusahaan mungkin merasa bahwa nilai produktivitas pekerja tersebut tidak sebanding dengan upah yang harus dibayarkan.

Sebaliknya, dalam perspektif ekonomi Keynesian, upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan agregat, yang pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dalam hal ini, upah minimum yang lebih tinggi tidak hanya dilihat sebagai biaya bagi perusahaan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan konsumsi. Peningkatan konsumsi ini dapat memicu peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya

meningkatkan permintaan tenaga kerja.



### 2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk dengan TPT

Penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Jumlah penduduk merupakan faktor demografi yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Jumlah penduduk yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pengangguran terbuka karena lebih banyak orang yang mencari pekerjaan dan kebutuhan akan lapangan pekerjaan akan meningkat.

Selain itu, jumlah penduduk yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pengangguran terbuka karena adanya kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan. Kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan dapat meningkatkan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan.

Jumlah penduduk yang relatif banyak akan mempengaruhi jumlah pengangguran di suatu wilayah. Menurut Arsyad (2010), Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap banyaknya pencari kerja di suatu wilayah.

Seperti yang diketahui bahwa tenaga kerja yang terampil merupakan potensi daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. BPS

pada konsep/definisi ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh



International Labour Organization (ILO). Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, dan dibedakan sebagai Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja.

Dalam perspektif ekonomi, jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka berhubungan dengan kesehatan ekonomi sebuah negara. Jumlah penduduk yang tinggi dapat meningkatkan konsumsi dan produktivitas ekonomi, namun juga dapat meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Model Solow menjelaskan bahwa negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan modal per pekerja dan pendapatan yang lebih rendah. Maka, diprediksi bahwa tingginya pertumbuhan penduduk, mengakibatkan sebuah negara mempunyai GDP yang rendah. Dengan kata lain, GDP yang rendah dalam efek ketenagakerjaan, akan mengakibatkan pengangguran.

### 2.2.3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan TPT

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka dapat dijelaskan dalam hukum okun. Hukum okun menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara perubahan dalam tingkat pertumbuhan output (produk domestik bruto atau PDB) dan perubahan dalam tingkat pengangguran. Hukum Okun menunjukkan bahwa ketika perekonomian tumbuh lebih cepat daripada tingkat potensialnya, tingkat pengangguran cenderung menurun, dan sebaliknya, ketika perekonomian tumbuh lebih lambat atau mengalami kontraksi, tingkat pengangguran cenderung meningkat. Hubungan ini membantu pembuat



kebijakan memahami dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pasar tenaga kerja.

#### **2.2.4. Hubungan Inflasi dengan TPT**

Para ekonom menjelaskan bahwa ada hubungan yang negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara inflasi dengan pengangguran adalah teori Philips. Teori ini menyatakan bahwa ada hubungan negatif jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Artinya, jika inflasi tinggi, pengangguran akan rendah, dan begitupun sebaliknya. Menurut Phillips (1958) pada Mankiw (2012), berpendapat bahwa kaitan diantara inflasi dan tingkat pengangguran dilandasi saat anggapan inflasi mencerminkan peningkatan permintaan agregat. Karena tingginya inflasi dan meningkatnya permintaan, produsen akan meningkatkan produksi dan akan menambah pekerja. Ketika permintaan buruh meningkat, harga akan meningkat (inflasi) dan tingkat pengangguran akan berkurang.

Dalam penelitiannya Alisa (2015) menyebutkan bahwa pengangguran yang maningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan peluang mencari pekerjaan juga masih merupakan masalah akut. Upaya pemerintah untuk merangsang permintaan agregat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya akan menyebabkan inflasi.



**tudi Empiris**

Pramudjasi dkk (2019) telah melakukan penelitian untuk menganalisis Pengaruh jumlah penduduk dan pendidikan serta upah terhadap pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alghofari (2010), dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh positif dan Signifikan terhadap tingkat tingkat pengangguran. Hasil ini juga sesuai dengan pendapat Malthus yang berpendapat bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh dengan pengangguran dalam Lindhiarta, (2014). Ketika jumlah penduduk meningkat dan ketika upah riil meningkat maka perusahaan akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerjanya, sementara penawaran tenaga kerja lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja, maka hal tersebut menyebabkan tingkat pengangguran akan meningkat.

Setiawan (2019) melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dipulau Sulawesi. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum terhadap pengangguran bervariasi di berbagai provinsi di Pulau Sulawesi. Di provinsi dengan ekonomi yang lebih dinamis, dampaknya lebih terbatas, sedangkan di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi lambat, dampaknya lebih signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2020) yang menunjukkan bahwa upah minimum yang lebih tinggi dapat

menurunkan tingkat pengangguran di daerah dengan pertumbuhan ekonomi



yang tidak cukup kuat. Di daerah dengan ekonomi yang berkembang pesat, dampak negatifnya lebih kecil.

Nurhidayah (2021) melakukan penelitian untuk menganalisis korelasi pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap pengangguran di pulau Sulawesi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran di Pulau Sulawesi. Namun, kenaikan upah minimum dapat memperburuk pengangguran di daerah tertentu jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menciptakan lapangan kerja baru. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ibrahim (2022) yang menemukan bahwa kenaikan upah minimum dapat meningkatkan tingkat pengangguran jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan upah minimum pada pengangguran terbuka.

Susanto (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran, sedangkan upah minimum memiliki efek positif terhadap pengangguran terbuka, terutama di daerah dengan jumlah penduduk yang besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2021) dengan hasil yang menunjukkan bahwa upah minimum di tingkat kabupaten/kota memiliki dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran, dengan dampak yang lebih besar di daerah dengan pertumbuhan ekonomi lambat dan jumlah penduduk yang tinggi.



Amrizal (2022) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi jambi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jika Indeks Pembangunan Manusia tinggi maka Tingkat Pengangguran Terbuka juga tinggi, artinya hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak signifikan. Pada variabel upah minimum provinsi ditemukan bahwa UMP berpengaruh negatif, artinya jika Upah Minimum Provinsi tinggi, tingkat pengangguran terbuka rendah. Hasil ini menunjukkan hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang signifikan.

Aulia dkk (2020) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran sedangkan variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2020), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran sedangkan variabel inflasi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Neno dkk (2024) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka yang mengindikasikan bahwa semakin pertumbuhan ekonomi maka akan signifikan meningkatkan angka guran. Selain itu, jumlah penduduk juga berpengaruh negatif terhadap



tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muminin & Hidayat (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka sedangkan jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Malak dkk (2023) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Pengangguran. PDRB dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasanuddin (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di pulau Sulawesi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran bervariasi tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan upah minimum terhadap pengangguran.

Rahman (2016) melakukan penelitian terkait hubungan inflasi dan pengangguran di Sudan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara inflasi dan pengangguran. Singh (2018) juga menemukan

inflasi tidak secara signifikan berpengaruh terhadap pengangguran.

& Moore (1999) menyebutkan bahwa fenomena kurva Phillips bisa saja



tidak terjadi di suatu negara karena faktor ekspektasi inflasi. Sementara Chu (2019), menyebutkan bahwa hubungan pengangguran dan inflasi hanya dalam jangka pendek sementara dalam jangka panjang tidak terdapat hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Dengan mempertimbangan adanya cash-inadvanced (CIA) pada tingkat konsumsi dan investasi research and development. Inflasi yang tinggi akan meningkatkan biaya peluang kepemilikan CIA yang mengarah kepada penurunan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pengangguran.

Govindharaj dkk (2023) melakukan penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian menderita akibat pertumbuhan penduduk yang menyebabkan masalah pengangguran,

Shina (2013) melakukan penelitian mengenai dampak pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia terhadap Pengangguran di India. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dampak signifikan dan positif pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, variabel upah minimum menunjukkan dampak negatif, meskipun secara statistik tidak signifikan, terhadap tingkat pengangguran dalam jangka pendek. Begitu pula dengan variable HDI yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran

ngka Panjang.

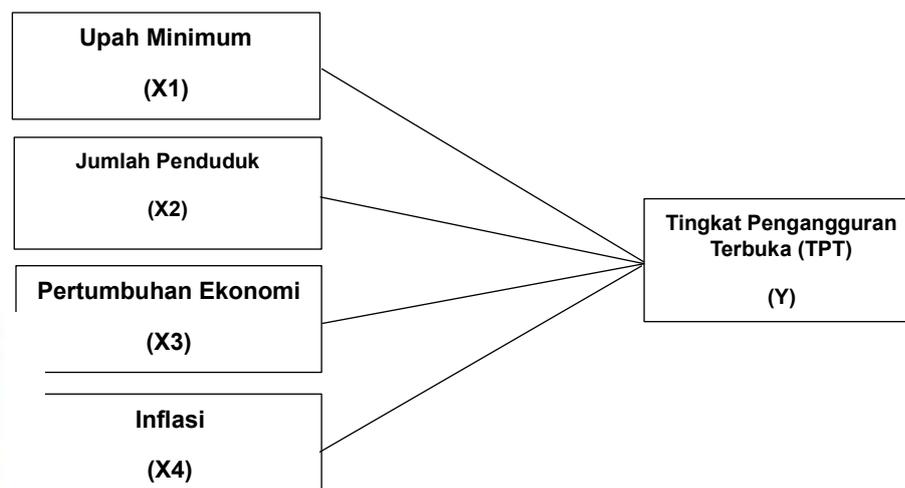


Autor dkk (2016) melakukan penelitian mengenai *the contribution of the minimum wage to U.S. wage inequality over three decades*. Variabel dalam penelitian ini, yaitu upah minimum, ketidaksetaraan upah, dan tingkat pengangguran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum di AS memiliki efek moderat dalam mengurangi ketidaksetaraan upah tanpa menyebabkan peningkatan signifikan dalam tingkat pengangguran.

Furlanetto dkk (2021) telah melakukan penelitian mengenai *population aging and the macroeconomy*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Jumlah penduduk usia kerja, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penuaan populasi di negara-negara maju dapat mengurangi angkatan kerja yang berdampak pada tingkat pengangguran, sementara juga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas atau variabel independent dan satu variabel dummy, yaitu Upah Minimum (X1), Jumlah Penduduk (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X3), Inflasi (X4) yang mempengaruhi variabel dependen Tingkat Pengangguran (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan.



## Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

### 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Maka hipotesis dari penelitian ini, yaitu:

1. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Diduga bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan

